

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajemukan merupakan realitas sosial dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia meliputi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Suku, agama, ras, dan antargolongan secara historis merupakan akar protonasionalisme bagi bangsa Indonesia (Hikam, 2000). Berdasarkan kemajemukan tersebut, Indonesia didirikan sebagai negara bangsa (*nation state*) yang mengakui dan melindungi keragaman budaya, tradisi, dan agama yang menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* (Musa, 2011).

Menerima dan menghargai kemajemukan merupakan prasyarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis. Menurut Gowan (1994) dalam masyarakat modern setiap bagian dari kemajemukan memiliki kesetaraan, tidak ada superioritas antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sebagai bangsa modern, eksklusivisme atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan sudah seharusnya ditinggalkan. Sebaliknya, kemajemukan harus dipandang sebagai bagian dari kekayaan dan sumber pemberdayaan bagi kemajuan bangsa (Risakotta, 2015)

Agama sebagai bagian dari kemajemukan bangsa memiliki posisi strategis dalam mewujudkan wawasan kebangsaan Indonesia modern. Sebagai bangsa yang religius, sebagian peran sosial masyarakat merupakan ekspresi dari ajaran agama yang dipeluknya (Madjid, 1994). Menurut Nottingham (1997) agama membantu

mendorong terciptanya persetujuan dan kewajiban sosial anggota masyarakat dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi menyalurkan sikap-sikap dan menetapkan kewajiban sosial mereka. Selain itu, menurut O’dea (1990) agama juga merupakan salah satu institusi penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial. Peran agama dalam masyarakat adalah sebagai salah satu institusi untuk mempertahankan sistem sosial.

Bangsa Indonesia memiliki beragam agama dan beragam kelompok atau aliran pada setiap agama (PP Nomor 1/PNPS Tahun 1965/UU Nomor 5 Tahun 1969; Koentjaraningrat, 2002). Pada umat Islam, kelompok muslim yang dipandang sebagai arus utama (*mainstream*) adalah Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (Hasani dan Naipospos, 2012). Dua kelompok muslim tersebut merupakan kelompok muslim pribumi (*indigenous*) dan memiliki karakteristik gerakan yang sama yaitu bersifat kultural dan moderat (Abdullah, 2000; Nashir, 2013). Karakteristik kultural berarti memiliki pandangan bahwa budaya (*culture*) dan adat (*tradition*) merupakan sarana transformasi agama sehingga keyakinan dan praktik keberagamaan menjadi dinamis (Burhani, 2001). Selanjutnya, karakteristik moderat yakni memiliki ciri utama tidak menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangan Islam, akomodatif terhadap konsep negara bangsa modern (*modern nation state*), dan organisasi terbuka (Hasani dan Naipospos, 2012). Pemahaman dan praktik keberagamaan secara kultural dan moderat dalam konteks masyarakat Indonesia dianggap sebagai gerakan Islam yang realistis dan kontekstual (Abdullah, 2000).

Seiring dengan bergulirnya era reformasi di Indonesia, gerakan Islam mengalami peningkatan, baik jumlah kelompok maupun aktivitasnya. Konsep yang mendasari munculnya gerakan Islam tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga berasal dari luar negeri yang dikenal sebagai gerakan Islam transnasional (Azra, 2009). Menurut Muzadi (2007) gerakan Islam transnasional adalah gerakan Islam yang didasarkan pada ideologi lintas negara yang dikembangkan di Indonesia baik berasal dari dunia Timur maupun Barat. Gerakan Islam transnasional yang berasal dari Timur di antaranya adalah Hizbut Tahrir, Jamaah Salafi, Ikhwanul Muslimin, al-Qaeda, dan Jamaah Tabligh. Gerakan Islam transnasional yang dipengaruhi oleh ideologi Barat misalnya Jaringan Islam Liberal (Muzadi, 2007) dan Gerakan Feminisme Islam (Luthfiyah, 2015). Gerakan Islam transnasional yang berasal dari Timur Tengah memiliki pengaruh lebih luas di Indonesia dibandingkan dengan gerakan Islam transnasional yang berasal dari Barat (Wahid, 2009).

Fenomena gerakan Islam transnasional telah menarik perhatian para peneliti baik di luar negeri maupun di Indonesia. Pada umumnya penelitian tentang gerakan Islam transnasional mengungkap tentang latar belakang, perkembangan, ideologi, dan agenda gerakannya. Penelitian Aderson (2009) mengungkap latar belakang dan perkembangan gerakan transnasional radikal al-Qaeda. Hasil penelitian menunjukkan munculnya gerakan ini dilatarbelakangi oleh perubahan sosial pada sistem kenegaraan dan para penguasa di dunia Arab. Pada awalnya gerakan al-Qaeda merupakan gerakan yang berskala lokal kemudian berkembang menjadi gerakan berskala global sejalan dengan dinamika

politik di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Penelitian Gul (2009) secara luas mengungkap keterlibatan kelompok muslim transnasional dalam program kampanye anti-Barat di Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan wilayah Afganistan-Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peranan jaringan kelompok muslim transnasional seperti al-Qaeda dan Ikhwan al-Muslimin di Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan wilayah Afganistan-Pakistan dalam melakukan kampanye anti-Barat yang dibantu secara finansial oleh kelompok Wahabi radikal.

Penelitian yang mengungkap tentang perkembangan gerakan Islam transnasional misalnya penelitian Ali (2010). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perkembangan gerakan Jamaah Tabligh sebagai kelompok muslim transnasional dalam menyebarkan keimanan Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap tentang proses transnasionalisasi gerakan Jamaah Tabligh ke seluruh dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jamaah Tabligh pada awalnya merupakan gerakan lokal yang secara gradual berkembang berskala nasional kemudian berskala global. Fokus utama gerakan ini adalah revitalisasi keimanan Islam melalui dakwah sebagaimana metode yang dilakukan Nabi Muhammad dan para sahabat pada masa awal Islam. Transnasionalisasi perkembangan gerakan ini didorong oleh adanya kewajiban berdakwah untuk mengatasi situasi krisis keimanan Islam karena pengaruh modernitas baik tingkat lokal maupun global.

Penelitian tentang gerakan Islam transnasional di Indonesia telah dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia (Mufid, 2011). Penelitian ini

mengungkap perkembangan dan mengidentifikasi karakteristik gerakan Islam transnasional di Indonesia. Fokus penelitian pada tiga kelompok Islam transnasional yaitu: Hizbut Tahrir, Salafi, dan Jamaah Tabligh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga kelompok Islam transnasional tersebut memiliki visi dan misi perjuangan yang berbeda-beda mulai dari yang *concern* dengan aktivitas dakwah sampai dengan perjuangan politik. Kemunculannya dimulai dari kebangkitan dan semangat juang para tokohnya atas penderitaan umat Islam di berbagai penjuru dunia oleh kolonialisme Barat atas negara-negara berpenduduk muslim. Perjuangan kelompok tersebut tidak menggunakan kekerasan, namun seringkali mengkritik dan menyalahkan kalangan muslim lain yang mengadopsi pandangan dan praktik kehidupan yang dianggap bukan berasal dari Islam seperti: demokrasi, kapitalisme, nasionalisme, konsep negara-bangsa (*nation-state*), dan hak asasi manusia.

Penelitian *LibForAll Foundation* (Wahid, 2009) secara lebih luas mengungkap asal-usul, ideologi, gerakan, dan respons para agen gerakan Islam transnasional tentang isu-isu sosial politik dan keagamaan. Penelitian ini juga mengungkap ada atau tidak adanya bahaya laten gerakan kelompok muslim transnasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan kelompok muslim transnasional membawa ideologi asing yang dapat mengancam eksistensi budaya dan tradisi keberagaman bangsa Indonesia, Pancasila, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penelitian *SETARA Institute* (Hasani dan Naipospos, 2012) mengungkap tentang relasi dan transformasi kelompok radikal Islam lokal dan transnasional

dengan kelompok teroris. Temuan penelitian ini adalah adanya relasi dan transformasi beberapa kelompok radikal transnasional maupun lokal dengan kelompok teroris. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penanganan terhadap kelompok radikal yang dalam konteks Indonesia dapat mengancam segi fundamental pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gerakan Islam transnasional memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan gerakan militan yang mewarnai dinamika masyarakat muslim dengan konsep utama revitalisasi *khilafah islamiyah* (pemerintahan Islam). Penelitian Al-Amin (2012) menemukan bahwa konsep negara Islam menurut Hizbut Tahrir/Hizbut Tahrir Indonesia merupakan konsep yang hanya didasarkan pada romantisme sejarah, ahistoris, dan tidak memiliki landasan sosial. Konsep tersebut apabila diterapkan di Indonesia sebagai negara plural, eksisnya sangat merugikan dan sekaligus mengingkari cita-cita para pendiri negara (*founding fathers*) negara Indonesia yang mendasarkan pada kebhinekaan dan kearifan budaya masyarakat.

Penelitian Nashir (2013) mengungkap eksistensi gerakan Islam syariat dalam dinamika sosial-keagamaan dan perkembangan masyarakat di Indonesia. Temuan penelitian ini adalah bahwa gerakan Islam yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam dalam institusi negara atau pemerintahan merupakan arus baru dalam perkembangan Islam mutakhir di Indonesia karena menampilkan Islam serba-syariat dengan orientasi yang formalistik dan ideologis. Gerakan ini berbeda dengan corak Islam dan islamisasi arus utama di Indonesia (NU dan Muhammadiyah) yang cenderung lentur dan kultural. Gerakan Islam syariat di Indonesia selain dilakukan oleh kelompok muslim lokal (Majelis Mujahidin

Indonesia dan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam) juga melibatkan kelompok muslim transnasional (Hizbut Tahrir Indonesia). Gerakan ini memicu terjadinya ketegangan kultural karena adanya semangat konflik atau persaingan dengan kelompok lain yang dipandang sebagai kekuatan yang mewakili (*proxy force*) penyebaran ideologi yang memusuhi dan menjadi musuh besar Islam.

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian Syaikh (2012) mengungkap tentang upaya organisasi Islam terbesar di Indonesia (NU dan Muhammadiyah) dalam membendung gerakan Islam transnasional. Adapun upaya yang dilakukan oleh dua organisasi Islam tersebut adalah melalui penguatan paham *ahlu as-sunnah wa al-jama'ah* secara internal kepada anggotanya dan secara aktif memengaruhi kebijakan negara dalam membangun tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang plural. Sejalan dengan penelitian Syaikh, Kholil dkk. (2014) telah melakukan penelitian melalui studi literatur secara mendalam tentang hubungan antara paham *ahlus sunnah waljamaah* dan gerakan Islam kontemporer (termasuk kelompok Islam transnasional). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun banyak gerakan Islam sekarang ini yang mengklaim berpaham *ahlus sunnah wal jamaah* namun tidak mencerminkan kelompok *salaf* (kaum muslim generasi pertama) yang sebenarnya karena metode yang ditempuh tidak kontekstual.

Kelompok Islam transnasional memiliki karakteristik yang berbeda dalam beberapa sisi dengan kelompok arus utama di Indonesia yang dikenal sebagai Islam moderat. Perbedaan mendasar antara kelompok Islam transnasional dan kelompok Islam moderat adalah: Pertama, ideologi politik. Ideologi politik yang

mendasari gerakan kelompok Islam transnasional adalah keinginan untuk menegakkan kembali sistem pemerintahan Islam (*khilafah islamiyah*), sedangkan kelompok Islam moderat telah menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus final (Wahid, 2009; Maarif, 2009). Kedua, metode gerakan. Metode gerakan yang ditempuh kelompok Islam transnasional adalah perubahan secara struktural meskipun dikemas dalam kegiatan dakwah (*al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar*) sedangkan kelompok Islam moderat menempuh metode gerakan perubahan secara kultural (Abdullah, 2000; Wahid, 2009). Ketiga, sikap terhadap pemikiran modern seperti demokrasi, konsep negara bangsa (*nation state*), pluralisme, dan hak asasi manusia. Kelompok Islam transnasional menolak pemikiran modern dari Barat yang dianggap sebagai antitesis Islam, sedangkan kelompok Islam moderat menerima pemikiran modern dari Barat yang dipandang tidak bertentangan dengan Islam (Wahid, 2009; Hidayatullah, 2010).

Karakteristik gerakan kelompok Islam transnasional tersebut dipandang dapat mengancam eksistensi kelompok muslim moderat di Indonesia. Kelompok NU mengeluarkan pernyataan berupa penolakan terhadap ideologi dan gerakan ekstremis transnasional. Sikap penolakan tersebut sebagaimana dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) yang secara tegas meminta kepada masyarakat Indonesia agar tidak mengikuti gerakan keagamaan yang berideologi transnasional karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan budaya bangsa Indonesia (NU online, 15 Mei 2007). Selain itu, gerakan politik dalam bentuk ideologi transnasional harus semakin diwaspadai karena mengancam

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NU Online, 22 Juni 2007). Begitu juga Muhammadiyah memberikan perhatian yang serius. Menurut Azra (2009) jika penetrasi pemikiran dan gerakan Islam transnasional dibiarkan menguat dalam Muhammadiyah dapat menimbulkan gesekan dan fiksi dalam persyarikatan. Pada saat yang sama dapat mengimbis pada citra dan identitas Muhammadiyah dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Selain itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk menjauhkan diri dari paham, misi, dan kepentingan organisasi atau gerakan lain (Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 149/KEP/I.0/B/2006).

Relasi antara anggota kelompok Islam transnasional dan Islam moderat seringkali tidak harmonis. Ketidakarmonisan relasi antarkelompok tersebut ditandai dengan adanya polemik melalui media massa, buku, media sosial, forum diskusi, forum pengajian, dan aksi penolakan di masyarakat. Polemik antar dua kelompok tersebut di antaranya adalah pernyataan Ketua PBNU Masdar F. Mas'udi yang telah mendapat laporan bahwa masjid-masjid milik warga NU telah dikuasai oleh kelompok yang mengklaim dirinya paling Islam, sedangkan kelompok lain dianggap *ahl al-bid'ah* (mengada-ada dalam urusan agama tanpa ada dasar normatifnya). Dia menyerukan warga NU untuk mengambilalih masjid-masjid tersebut (NU Online, 28 Juli 2008). Demikian juga di kalangan generasi muda NU, pada acara dialog yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes sepakat untuk mewaspadaai gerakan Islam transnasional yang dianggap telah mengobol-obok ajaran *ahlu as-sunnah wa al-jamaah* dan menggerogoti *Jam'iyah* NU (NU Online. 22 Oktober 2008).

Pandangan tokoh muslim arus utama terhadap gerakan salafi sebagaimana pernyataan Azra (dalam Idahram, 2011) Wahabisme merupakan salah satu aliran radikal dalam pemikiran dan gerakan salafi. Wahabisme dituduh sebagai aliran pemikiran (*mazhab*) yang paling tidak toleran, menggunakan segala cara - termasuk kekerasan- untuk pengembangan dan penerapan “Islam murni”. Demikian juga menurut Siraj (dalam Idahram, 2011) Salafi Wahabi memiliki beberapa sisi kesamaan dengan *Khawarij* (salah satu kelompok ekstrem pada masa awal Islam).

Pernyataan para tokoh muslim moderat tersebut oleh Juru Bicara HTI dianggap sebagai perilaku gagal yang dilakukan kelompok muslim arus utama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai universal tentang keadilan, keberpihakan terhadap kelompok tertindas, kesejahteraan rakyat, toleransi, dan anti-diskriminasi yang seharusnya menjadi bagian integral dari perjuangan mereka. Kelompok muslim arus utama yang selama ini gencar sekali menyerukan dialog, seolah-olah justeru menutup pintu dialog, mengkritik, dan menfitnah tanpa perasaan sungkan (Yusanto, 2013).

Penilaian negatif tokoh-tokoh NU terhadap gerakan salafi dianggap oleh kelompok salafi sebagai bentuk penentang dakwah *tauhid*. Menurut mereka, para penentang dakwah *tauhid* berada dalam satu grup yaitu NU. Secara historis, di antara motif yang melatari berdirinya NU adalah untuk menghadang gerakan Wahabi (Ghufron, 2005). Demikian juga di kalangan generasi muda NU dan Muhammadiyah dianggap telah terjangkiti virus liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Munculnya Jaringan Islam Liberal (JIL), Jaringan Intelektual Muda

Muhammadiyah (JIMM), dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam NU) dianggap sebagai agen Amerika dalam mengembangkan pandangan Barat. Mereka diposisikan seolah-olah bagian tak terpisahkan dari organisasi induknya. Dukungan Amerika terhadap mereka diwujudkan dalam bentuk dana maupun pujian. Selain itu, pemberian penghargaan kepada para tokoh NU dan Muhammadiyah, perhatian media yang berafiliasi kepada Amerika secara berlebih, dan dukungan dana yang disalurkan kepada lembaga yang dibentuk mereka, dimaksudkan agar lembaga tersebut dapat bergerak sesuai pesanan (Yusanto, 2010).

Kelompok muslim transnasional juga dituduh memiliki keterlibatan dalam aksi kekerasan dan gerakan terorisme di Indonesia. Rahardjo (dalam Masduqi, 2011) mengajukan hipotesis bahwa pengaruh gerakan Islam transnasional yang mencita-citakan tegaknya syariat Islam di semua bidang kehidupan memiliki andil dalam meningkatnya aksi kekerasan di Indonesia. Anggota kelompok muslim transnasional dari Jamaah Tabligh membantah tuduhan keterlibatan mereka dalam gerakan terorisme. Tuduhan tersebut dianggap sebagai tuduhan bodoh dan lucu. Gerakan dakwah dan teror ibarat timur dan barat. Gerakan Jamaah Tabligh bertujuan mengajak manusia kepada kebaikan dunia dan akhirat tidak mungkin dilakukan dengan cara teror. Sebaliknya, Jamaah Tabligh melakukan dakwah seikhmah mungkin sehingga tujuan dapat tercapai (Abduh, 2008).

Berdasarkan studi tentang fakta-fakta empiris hubungan antara kelompok Islam transnasional dan kelompok Islam moderat di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas (*das sollen*) dan realitas yang terjadi di

masyarakat (*das sein*). Idealitas yang seharusnya dipegang oleh masing-masing kelompok di tengah perbedaan dan keragaman adalah toleransi, inklusivisme, dan pluralisme (Misrawi, 2007). Toleransi merupakan bagian dari perilaku seseorang dalam situasi sosial untuk menerima pendapat, nilai-nilai, dan perilaku orang (kelompok) lain meskipun ia tidak menyetujui hal tersebut. Inklusivisme adalah paham yang menganggap bahwa kebenaran tidak hanya terdapat pada kelompok sendiri, melainkan juga ada pada kelompok lain. Selanjutnya, pluralisme merupakan tahap idealitas yang lebih tinggi karena terkandung tiga prinsip penting yaitu: Pertama, keterlibatan aktif (*active engagement*) di tengah keragaman dan perbedaan. Kedua, pemahaman konstruktif (*constructive understanding*) yaitu pemahaman yang lengkap terhadap kelompok lain. Ketiga, menemukan komitmen (*encounter commitments*) yaitu mencari titik temu untuk membangun komitmen bersama diantara berbagai perbedaan dan keragaman komitmen (Misrawi, 2007). Realitas yang terjadi justru sebaliknya, masing-masing kelompok tidak bisa menerima pendapat, nilai-nilai, dan perilaku kelompok lain sehingga hubungan antarkelompok tersebut bersifat antagonis.

Antagonisme kelompok terjadi ketika anggota suatu kelompok (*ingroup*) menunjukkan sikap dan perilaku negatif terhadap anggota kelompok lain (*outgroup*). Menurut Taylor, Peplau, dan Sears (2009) antagonisme kelompok memiliki tiga elemen yang saling terkait yaitu stereotip (kognitif), prasangka (afektif), dan diskriminasi (behavioral). Stereotip dan prasangka merupakan elemen sikap antagonisme kelompok yang dalam kenyataan merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan muncul secara bersamaan (Dovidio, Brigham,

Johnson, dan Geartner, 1996). Pemilahan dua elemen tersebut dimaksudkan untuk membantu pemahaman (Taylor, Peplau, dan Sears, 2009). Menurut Gordijn, Koomen, dan Stapel (2001) orang yang berprasangka sudah pasti memiliki stereotip karena sikap negatif merupakan elemen campuran antara kognitif dan afektif.

Diskriminasi sebagai elemen perilaku antagonisme kelompok dalam studi prasangka dapat dipahami sebagai kecenderungan perilaku (konatif) bukan perilakunya itu sendiri (Hogg dan Vaughan, 2011). Apabila kecenderungan-kecenderungan tersebut diwujudkan dalam perilaku maka baru akan terjadi diskriminasi (Baron dan Byrne, 2003). Berdasarkan pendapat tersebut maka penelitian ini hanya menggunakan istilah prasangka untuk mengungkap sikap negatif antarkelompok yang memuat elemen kognitif, afektif, dan konatif.

Prasangka adalah salah satu elemen antagonisme kelompok yang dapat melahirkan perilaku destruktif dan tindakan kekerasan yang mengerikan (Taylor, Peplau, dan Sears, 2009). Menurut Putra dan Pitaloka (2012) prasangka merupakan upaya atau keinginan merendahkan individu atau anggota kelompok lain, maka rentan menimbulkan kebencian dan konflik antarkelompok atau individu sebagai representasi kelompok. Prasangka di kemudian hari berpotensi memicu konflik, bahkan dapat menimbulkan terjadinya tragedi kemanusiaan, seperti genosida (pembunuhan manusia secara besar-besaran).

Indikasi yang menunjukkan adanya prasangka antara kelompok Islam transnasional dan kelompok Islam moderat di Indonesia adalah: Pertama, menurut Abrams (2010) secara teoretis prasangka terjadi dalam konteks relasi

antarkelompok (*intergroup relationship*) yang ditandai adanya: Ketidaksetaraan, keterancaman, konflik, status, kekuasaan, legitimasi, dan perbedaan. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa relasi antara kedua kelompok tersebut diwarnai konflik dalam bentuk polemik di media massa, aksi penolakan, penghinaan, dan keterancaman (Wahid, 2009; Mufid, 2011; Sulistio, 2012). Kedua, menurut Brown (1995) prasangka dimanifestasikan dalam bentuk perilaku seperti penolakan, antipati, kewaspadaan, ketakutan, kecurigaan, penghinaan, permusuhan, dan tindakan saling membunuh. Beberapa kajian empiris menunjukkan bahwa perilaku antara kedua kelompok tersebut ditandai adanya: Aksi penolakan, rasa tidak suka, kewaspadaan, kecurigaan, penghinaan, dan kecenderungan bermusuhan, meskipun belum tampak adanya kecenderungan perilaku saling membunuh di antara mereka (Wahid, 2009; Mufid, 2011; Sulistio, 2012).

Fokus penelitian ini hanya pada prasangka kelompok Islam transnasional terhadap kelompok Islam moderat. Alasan yang mendasarinya adalah: Pertama, prasangka kelompok Islam transnasional terhadap kelompok Islam moderat dapat menyebabkan perilaku permusuhan yang berdampak luas, baik terhadap kelompok Islam moderat maupun terhadap sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut Yusanto (2013) kelompok Islam transnasional memiliki agenda politik untuk menegakkan *khilafah islamiyah* (sistem pemerintahan Islam) dan memiliki pandangan bahwa sistem pemerintahan selain itu adalah sistem *thaghut* (berhala). Pandangan tersebut dapat memicu permusuhan dengan kelompok Islam lain yang

menerima sistem negara bangsa (*nation state*) dan telah menjadi konsensus nasional bangsa Indonesia (Ubaid dan Bakir, 2015).

Kedua, prasangka kelompok Islam transnasional terhadap kelompok Islam moderat dapat memicu terjadinya perilaku pemusnahan tradisi keagamaan sebagai bagian dari budaya bangsa. Menurut Mufid (2011) kelompok Islam transnasional memiliki agenda “pemurnian Islam” dan menganggap keberagaman sebagian kelompok Islam moderat adalah *bid'ah* (mengada-ada dalam persoalan keagamaan tanpa didukung oleh dalil yang sah). Agenda “pemurnian Islam” dan anggapan *bid'ah* terhadap kelompok Islam lain dapat menyebabkan terjadinya perilaku pemusnahan budaya (*cultural genocide*) karena mengancam eksistensi dan merusak tradisi keagamaan mayoritas umat Islam di Indonesia (Wahid, 2009).

Subjek penelitian ini adalah anggota Jamaah Tabligh yang diidentifikasi sebagai kelompok muslim transnasional yang berkembang cukup pesat di Indonesia sehingga harus lebih mendapat perhatian (Mufid, 2011). Kelompok Islam moderat yang dijadikan target prasangka dalam penelitian ini adalah anggota Nahdhatul Ulama (NU) karena merupakan kelompok muslim mayoritas di Indonesia dan eksistensinya merupakan representasi dari Islam nusantara (Ubaid dan Bakir, 2015)

Menurut Abrams (2010) variabel yang diidentifikasi sebagai basis prasangka adalah kategorisasi, identitas sosial, nilai-nilai, serta kepribadian dan motivasi personal. Kategorisasi memiliki hubungan yang esensial dengan prasangka (Brown, 1995). Menurut Allport (1982) dan Tajfel dan Turner (1979) tanpa kategorisasi, prasangka tidak mungkin ada. Pendapat Allport, Tajfel, dan

Turner tersebut dikuatkan oleh Brewer dan Brown (1998) yang menemukan bahwa individu yang memiliki prasangka tinggi biasanya suka mengkategorisasikan orang lain berdasarkan ras atau etnis.

Keterikatan, kepedulian, dan kebanggaan pada suatu kelompok membentuk identitas sosial yang merupakan bagian dari konsep diri seseorang (Tajfel, 1982). Penelitian Operario dan Fiske (2001) dan Akhbas (2010) menemukan bahwa identitas kelompok memiliki hubungan kuat dengan prasangka. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian Voci (2006) menunjukkan bahwa identitas kelompok berkorelasi positif dengan evaluasi negatif terhadap kelompok lain. Penelitian Barlow, Louis dan Tery (2010) dan penelitian Ali, Indrawati, dan Masykur (2010) menemukan bahwa identitas etnis berpengaruh terhadap intoleransi kepada etnis lain. Penelitian Bukhori (2010) menemukan bahwa identitas agama berpengaruh terhadap prasangka kepada etnis lain. Penelitian Branscombe dan Wann (1994) menunjukkan bahwa dalam kondisi terancam kaitan antara identifikasi dengan diferensiasi antarkelompok semakin kuat.

Perbedaan nilai-nilai yang dipegang oleh masing-masing kelompok dapat menjadi basis prasangka (Abrams, 2010). Nilai-nilai individual yang diyakini seseorang seperti kesetaraan, penghormatan pada tradisi dan keadilan sosial, merupakan bagian penting dalam kehidupan mereka. Beberapa nilai individual yang diidentifikasi menjadi basis prasangka adalah egalitarianisme, individualisme, dan liberalisme (Abrams, 2010). Selain itu, penelitian Brandt dan Reyna (2010)

dan Gebert dkk. (2014) menemukan bahwa fundamentalisme agama berpengaruh pada prasangka kepada kelompok lain.

Tipe kepribadian dan motivasi personal juga berpengaruh terhadap prasangka. Penelitian Adorno dkk. (1950) menemukan bahwa tipe kepribadian otoritarian berpengaruh terhadap prasangka. Altemeyer (1996) menemukan bahwa tipe kepribadian *right-wing authoritarian* (RWA) berpengaruh terhadap prasangka. Selain itu, Sidanius dan Pratto (1999) menemukan bahwa tipe kepribadian *social dominance orientation* (SDO) juga berpengaruh terhadap prasangka. Meskipun RWA dan SDO dikritik oleh Duckitt (2006) bukan sebagai karakter kepribadian (tetapi sebagai sikap politik), namun hingga beberapa tahun terakhir, RWA dan SDO masih terbukti sebagai variabel penting yang berkaitan dengan prasangka (Asbroct dkk., 2012; Dhont dan Hewstone, 2014).

Selain penelitian yang melibatkan variabel yang berpengaruh terhadap prasangka, telah ada penelitian berupa intervensi sosial yang dianggap sebagai variabel cukup kuat untuk mengurangi prasangka serta menangkal efek-efek terburuknya. Allport (1982) mengajukan teori hipotesis kontak (*the contact hypothesis theory*) sebagai cara terbaik untuk mengurangi prasangka antarkelompok. Teori Hipotesis kontak yang dikemukakan Allport tersebut juga dikuatkan oleh penelitian Amir (1969 dan 1976); Cook (1962 dan 1978); Pettigrew (1998, dan 2007); Voci dan Hewstone (2003); Asbroct, Christ, Duckitt, Sibley (2012); Maliepard dan Phalet (2012); Dhont dan Hiel (2011); Smith, Axelton, dan Saucier (2009); dan Dhont, Heil, dan Hewstone (2014).

Berdasarkan studi teoretis tentang variabel-variabel yang berpengaruh terhadap prasangka dan studi empiris tentang karakteristik kelompok Islam transnasional maka ada beberapa variabel yang diasumsikan berpengaruh pada prasangka kelompok tersebut. Pertama, kontak antarkelompok. Kontak antarkelompok berpengaruh terhadap prasangka karena secara teoretis intensitas kontak dapat meningkatkan pemahaman terhadap kelompok lain, mengurangi stereotip, dan mengurangi ilusi homogenitas *outgroup* (Pettigraw, 2007). Kontak antarkelompok diasumsikan berpengaruh terhadap prasangka kelompok Islam transnasional (khususnya Jamaah Tabligh) karena aktivitas yang ditekankan dan menjadi tugas utama setiap anggota kelompok tersebut adalah melakukan dakwah kepada seluruh umat manusia lintas kelompok, agama, etnis, dan bangsa. Metode dakwah yang ditempuh adalah melalui *khuruj* yaitu dalam bentuk dakwah *umumi* (berkeliling mendatangi masyarakat secara umum, *jaulah*) dan dakwah *khusus* (silaturahmi interpersonal) baik dilakukan secara individual maupun berkelompok (Abduh, 2008).

Kedua, identitas kelompok. Identitas kelompok diasumsikan berpengaruh terhadap prasangka kelompok Islam transnasional karena secara teoretis ketertarikan, kepedulian, dan kebanggaan pada kelompok akan membentuk identitas sosial yang merupakan bagian dari konsep diri seseorang (Tajfel, 1982). Kuatnya identitas kelompok Islam transnasional dibentuk oleh karakteristik kelompok yang mengembangkan pembinaan anggota melalui sistem pembinaan keislaman (*manhaj tarbiyah islamiyah*) secara tertutup (*exclusive*) dari kelompok

lain melalui *halaqah* (kelompok binaan) dengan menggunakan sistem sel (Ali, 2012).

Ketiga, fundamentalisme agama. Fundamentalisme agama diasumsikan berpengaruh terhadap prasangka kelompok Islam transnasional karena secara teoretis nilai-nilai yang berasal dari pemahaman agama yang diyakini seseorang merupakan bagian penting dalam kehidupan yang memengaruhi sikap dan perilaku (Nottingham, 1997). Nilai-nilai fundamentalisme agama dikembangkan oleh kelompok Islam transnasional melalui metode pemahaman teks keagamaan secara tekstual, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme pemahaman keagamaan, dan penolakan terhadap pemikiran modern (dari Barat) yang dianggap sebagai antitesis Islam (Azra, 1996; Ali, 2012).

1.2. Kajian Masalah

Berdasarkan studi tentang fakta-fakta empiris hubungan antara kelompok Islam transnasional dan kelompok Islam moderat menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas (*das sollen*) dan realitas yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Idealitas yang seharusnya dipegang oleh masing-masing kelompok di tengah perbedaan dan keragaman adalah toleransi, inklusivisme, dan pluralisme (Misrawi, 2007). Toleransi merupakan bagian dari perilaku seseorang dalam situasi sosial untuk menerima pendapat, nilai-nilai, dan perilaku orang (kelompok) lain meskipun ia tidak menyetujui hal tersebut. Inklusivisme adalah paham yang menganggap bahwa kebenaran tidak hanya terdapat pada kelompok sendiri, melainkan juga ada pada kelompok lain. Selanjutnya, pluralisme merupakan tahap idealitas yang lebih tinggi karena terkandung tiga prinsip penting yaitu: Pertama,

keterlibatan aktif (*active engagement*) di tengah keragaman dan perbedaan. Kedua, pemahaman konstruktif (*constructive understanding*) yaitu pemahaman yang lengkap terhadap kelompok lain. Ketiga, menemukan komitmen (*encounter commitments*) yaitu mencari titik temu untuk membangun komitmen bersama diantara berbagai perbedaan dan keragaman komitmen (Misrawi, 2007). Realitas yang terjadi justru sebaliknya, masing-masing kelompok tidak bisa menerima pendapat, nilai-nilai, dan perilaku kelompok lain sehingga hubungan antarkelompok tersebut bersifat antagonis.

Antagonisme kelompok terjadi ketika anggota suatu kelompok (*ingroup*) menunjukkan sikap dan perilaku negatif terhadap anggota kelompok lain (*outgroup*). Menurut Taylor, Peplau, dan Sears (2009) antagonisme kelompok memiliki tiga elemen yang saling terkait yaitu stereotip (kognitif), prasangka (afektif), dan diskriminasi (behavioral). Stereotip dan prasangka merupakan elemen sikap antagonisme kelompok yang dalam kenyataan merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan muncul secara bersamaan (Dovidio, Brigham, Johnson, dan Gaertner, 1996). Pemilahan dua elemen tersebut dimaksudkan untuk membantu pemahaman (Taylor, Peplau, dan Sears, 2009). Menurut Gordijn, Koomen, dan Stapel (2001) orang yang berprasangka sudah pasti memiliki stereotip karena sikap negatif merupakan elemen campuran antara kognitif dan afektif.

Diskriminasi sebagai elemen perilaku antagonisme kelompok dalam studi prasangka dapat dipahami sebagai kecenderungan perilaku (konatif) bukan perilakunya itu sendiri (Hogg dan Vaughan, 2011). Apabila kecenderungan-

kecenderungan tersebut diwujudkan dalam perilaku maka baru akan terjadi diskriminasi (Baron dan Byrne, 2003). Berdasarkan pendapat tersebut maka penelitian ini hanya menggunakan istilah prasangka untuk mengungkap sikap negatif antarkelompok yang memuat elemen kognitif, afektif, dan konatif.

Prasangka adalah salah satu elemen antagonisme kelompok yang dapat melahirkan perilaku destruktif dan tindakan kekerasan yang mengerikan (Taylor, Peplau, dan Sears, 2009). Menurut Putra dan Pitaloka (2012) prasangka merupakan upaya atau keinginan merendahkan individu atau anggota kelompok lain, maka rentan menimbulkan kebencian dan konflik antarkelompok atau individu sebagai representasi kelompok. Prasangka di kemudian hari berpotensi memicu konflik, bahkan dapat menimbulkan terjadinya tragedi kemanusiaan, seperti genosida (pembunuhan manusia secara besar-besaran).

Indikasi yang menunjukkan adanya prasangka antara kelompok Islam transnasional dan kelompok Islam moderat di Indonesia adalah: Pertama, menurut Abrams (2010) secara teoretis prasangka terjadi dalam konteks relasi antarkelompok (*intergroup relationship*) yang ditandai adanya: Ketidaksetaraan, keterancaman, konflik, status, kekuasaan, legitimasi, dan perbedaan. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa relasi antara kedua kelompok tersebut diwarnai konflik dalam bentuk polemik di media massa, aksi penolakan, penghinaan, dan keterancaman (Wahid, 2009; Mufid, 2011; Sulistio, 2012). Kedua, menurut Brown (1995) prasangka dimanifestasikan dalam bentuk perilaku seperti penolakan, antipati, kewaspadaan, ketakutan, kecurigaan, penghinaan, permusuhan, dan tindakan saling membunuh. Beberapa kajian empiris

menunjukkan bahwa perilaku antara kedua kelompok tersebut ditandai adanya: Aksi penolakan, rasa tidak suka, kewaspadaan, kecurigaan, penghinaan, dan kecenderungan bermusuhan, meskipun belum tampak adanya kecenderungan perilaku saling membunuh di antara mereka (Wahid, 2009; Mufid, 2011; Sulistio, 2012).

Fokus penelitian ini hanya pada prasangka kelompok Islam transnasional terhadap kelompok Islam moderat. Alasan yang mendasarinya adalah: Pertama, prasangka kelompok Islam transnasional terhadap kelompok Islam moderat dapat menyebabkan perilaku permusuhan yang berdampak luas, baik terhadap kelompok Islam moderat maupun terhadap sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut Yusanto (2013) kelompok Islam transnasional memiliki agenda politik untuk menegakkan *khilafah islamiyah* (sistem pemerintahan Islam) dan memiliki pandangan bahwa sistem pemerintahan selain itu adalah sistem *thaghut* (berhala). Pandangan tersebut dapat memicu permusuhan dengan kelompok Islam lain yang menerima sistem negara bangsa (*nation state*) dan telah menjadi konsensus nasional bangsa Indonesia (Ubaid dan Bakir, 2015).

Kedua, prasangka kelompok Islam transnasional terhadap kelompok Islam moderat dapat memicu terjadinya perilaku pemusnahan tradisi keagamaan sebagai bagian dari budaya bangsa. Menurut Mufid (2011) kelompok Islam transnasional memiliki agenda “pemurnian Islam” dan menganggap keberagaman sebagian kelompok Islam moderat adalah *bid'ah* (mengada-ada dalam persoalan keagamaan tanpa didukung oleh dalil yang sah). Agenda “pemurnian Islam” dan anggapan *bid'ah* terhadap kelompok Islam lain dapat menyebabkan terjadinya

perilaku pemusnahan budaya (*cultural genocide*) karena mengancam eksistensi dan merusak tradisi keagamaan mayoritas umat Islam di Indonesia (Wahid, 2009).

Subjek penelitian ini adalah anggota Jamaah Tabligh yang diidentifikasi sebagai kelompok muslim transnasional yang berkembang cukup pesat di Indonesia sehingga harus lebih mendapat perhatian (Mufid, 2011). Kelompok Islam moderat yang dijadikan target prasangka dalam penelitian ini adalah anggota Nahdhatul Ulama (NU) karena merupakan kelompok muslim mayoritas di Indonesia dan eksistensinya merupakan representasi dari Islam nusantara (Ubaid dan Bakir, 2015)

Menurut Abrams (2010) variabel yang diidentifikasi sebagai basis prasangka adalah kategorisasi, identitas sosial, nilai-nilai, serta kepribadian dan motivasi personal. Kategorisasi memiliki hubungan yang esensial dengan prasangka (Brown, 1995). Menurut Allport (1982) dan Tajfel dan Turner (1979) tanpa kategorisasi, prasangka tidak mungkin ada. Pendapat Allport, Tajfel, dan Turner tersebut dikuatkan oleh Brewer dan Brown (1998) yang menemukan bahwa individu yang memiliki prasangka tinggi biasanya suka mengkategorisasikan orang lain berdasarkan ras atau etnis.

Keterikatan, kepedulian, dan kebanggaan pada suatu kelompok membentuk identitas sosial yang merupakan bagian dari konsep diri seseorang (Tajfel, 1982). Penelitian Operario dan Fiske (2001) dan Akhbas (2010) menemukan bahwa identitas kelompok memiliki hubungan kuat dengan prasangka. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian Voci (2006) menunjukkan bahwa identitas kelompok berkorelasi positif dengan evaluasi

negatif terhadap kelompok lain. Penelitian Barlow, Louis dan Tery (2010) dan penelitian Ali, Indrawati, dan Masykur (2010) menemukan bahwa identitas etnis berpengaruh terhadap intoleransi kepada etnis lain. Penelitian Bukhori (2010) menemukan bahwa identitas agama berpengaruh terhadap prasangka kepada etnis lain. Penelitian Branscombe dan Wann (1994) menunjukkan bahwa dalam kondisi terancam kaitan antara identifikasi dengan diferensiasi antarkelompok semakin kuat.

Perbedaan nilai-nilai yang dipegang oleh masing-masing kelompok dapat menjadi basis prasangka (Abrams, 2010). Nilai-nilai individual yang diyakini seseorang seperti kesetaraan, penghormatan pada tradisi dan keadilan sosial, merupakan bagian penting dalam kehidupan mereka. Beberapa nilai individual yang diidentifikasi menjadi basis prasangka adalah egalitarianisme, individualisme, dan liberalisme (Abrams, 2010). Selain itu, penelitian Brandt dan Reyna (2010) dan Gebert dkk. (2014) menemukan bahwa fundamentalisme agama berpengaruh pada prasangka kepada kelompok lain.

Tipe kepribadian dan motivasi personal juga berpengaruh terhadap prasangka. Penelitian Adorno dkk. (1950) menemukan bahwa tipe kepribadian otoritarian berpengaruh terhadap prasangka. Altemeyer (1996) menemukan bahwa tipe kepribadian *right-wing authoritarian* (RWA) berpengaruh terhadap prasangka. Selain itu, Sidanius dan Pratto (1999) menemukan bahwa tipe kepribadian *social dominance orientation* (SDO) juga berpengaruh terhadap prasangka. Meskipun RWA dan SDO dikritik oleh Duckitt (2006) bukan sebagai karakter kepribadian (tetapi sebagai sikap politik), namun hingga beberapa tahun

terakhir, RWA dan SDO masih terbukti sebagai variabel penting yang berkaitan dengan prasangka (Asbroct dkk., 2012; Dhont dan Hewstone, 2014).

Selain penelitian yang melibatkan variabel yang berpengaruh terhadap prasangka, telah ada penelitian berupa intervensi sosial yang dianggap sebagai variabel cukup kuat untuk mengurangi prasangka serta menangkal efek-efek terburuknya. Allport (1982) mengajukan teori hipotesis kontak (*the contact hypothesis theory*) sebagai cara terbaik untuk mengurangi prasangka antarkelompok. Teori Hipotesis kontak yang dikemukakan Allport tersebut juga dikuatkan oleh penelitian Amir (1969 dan 1976); Cook (1962 dan 1978); Pettigrew (1998, dan 2007); Voci dan Hewstone (2003); Asbroct, Christ, Duckitt, Sibley (2012); Maliepard dan Phalet (2012); Dhont dan Hiel (2011); Smith, Axelton, dan Saucier (2009); dan Dhont, Heil, dan Hewstone (2014).

Berdasarkan studi teoretis tentang variabel-variabel yang berpengaruh terhadap prasangka dan studi empiris tentang karakteristik kelompok Islam transnasional maka ada beberapa variabel yang diasumsikan berpengaruh pada prasangka kelompok tersebut. Pertama, kontak antarkelompok. Kontak antarkelompok berpengaruh terhadap prasangka karena secara teoretis intensitas kontak dapat meningkatkan pemahaman terhadap kelompok lain, mengurangi stereotip, dan mengurangi ilusi homogenitas *outgroup* (Pettigraw, 2007). Kontak antarkelompok diasumsikan berpengaruh terhadap prasangka kelompok Islam transnasional (khususnya Jamaah Tabligh) karena aktivitas yang ditekankan dan menjadi tugas utama setiap anggota kelompok tersebut adalah melakukan dakwah kepada seluruh umat manusia lintas kelompok, agama, etnis, dan bangsa. Metode

dakwah yang ditempuh adalah melalui *khuruj* yaitu dalam bentuk dakwah *umumi* (berkeliling mendatangi masyarakat secara umum, *jaulah*) dan dakwah *khusus* (silaturahmi interpersonal) baik dilakukan secara individual maupun berkelompok (Abduh, 2008).

Kedua, identitas kelompok. Identitas kelompok diasumsikan berpengaruh terhadap prasangka kelompok Islam transnasional karena secara teoretis ketertarikan, kepedulian, dan kebanggaan pada kelompok akan membentuk identitas sosial yang merupakan bagian dari konsep diri seseorang (Tajfel, 1982). Kuatnya identitas kelompok Islam transnasional dibentuk oleh karakteristik kelompok yang mengembangkan pembinaan anggota melalui sistem pembinaan keislaman (*manhaj tarbiyah islamiyah*) secara tertutup (*exclusive*) dari kelompok lain melalui *halaqah* (kelompok binaan) dengan menggunakan sistem sel (Ali, 2012).

Ketiga, fundamentalisme agama. Fundamentalisme agama diasumsikan berpengaruh terhadap prasangka kelompok Islam transnasional karena secara teoretis nilai-nilai yang berasal dari pemahaman agama yang diyakini seseorang merupakan bagian penting dalam kehidupan yang memengaruhi sikap dan perilaku (Nottingham, 1997). Nilai-nilai fundamentalisme agama dikembangkan oleh kelompok Islam transnasional melalui metode pemahaman teks keagamaan secara tekstual, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme pemahaman keagamaan, dan penolakan terhadap pemikiran modern (dari Barat) yang dianggap sebagai antitesis Islam (Azra, 1996; Ali, 2012).

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah secara umum penelitian ini adalah: Apakah model teoretis prasangka kelompok Islam transnasional terhadap kelompok Islam moderat yang dipengaruhi oleh kontak antarkelompok dengan identitas kelompok dan fundamentalisme agama sebagai variabel mediator yang telah dibangun *fit*? Adapun rumusan masalah secara spesifik penelitian ini adalah:

1. Apakah kontak antarkelompok berpengaruh secara langsung terhadap prasangka kelompok Islam transnasional kepada kelompok Islam moderat?
2. Apakah identitas kelompok berpengaruh terhadap prasangka kelompok Islam transnasional kepada kelompok Islam moderat?
3. Apakah fundamentalisme agama berpengaruh pada prasangka kelompok Islam transnasional kepada kelompok Islam moderat?
4. Apakah kontak antarkelompok berpengaruh terhadap identitas kelompok?
5. Apakah kontak antarkelompok berpengaruh terhadap fundamentalisme agama?
6. Apakah kontak antarkelompok berpengaruh secara tidak langsung terhadap prasangka kelompok Islam transnasional kepada kelompok Islam moderat yang dimediasi oleh identitas kelompok dan fundamentalisme agama?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menguji dan menganalisis model teoretis prasangka kelompok Islam transnasional terhadap kelompok Islam moderat yang dipengaruhi oleh kontak antarkelompok dengan identitas kelompok

dan fundamentalisme agama sebagai variabel mediator dengan data dari lapangan.

Adapun tujuan penelitian secara spesifik adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung kontak antarkelompok terhadap prasangka kelompok Islam transnasional kepada kelompok Islam moderat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh identitas kelompok terhadap prasangka kelompok Islam transnasional kepada kelompok Islam moderat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh fundamentalisme agama terhadap prasangka kelompok Islam transnasional kepada kelompok Islam moderat.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kontak antarkelompok terhadap identitas kelompok.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kontak antarkelompok terhadap fundamentalisme agama.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara tidak langsung kontak antarkelompok terhadap prasangka kelompok Islam transnasional kepada kelompok Islam moderat yang dimediasi oleh identitas kelompok dan fundamentalisme agama.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat secara teoretis penelitian ini adalah mendapatkan model teoretis prasangka kelompok Islam transnasional terhadap kelompok Islam moderat. Melalui model tersebut dapat diperoleh penjelasan ilmiah tentang pengaruh antarvariabel yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman objektif tentang variabel yang berpengaruh pada prasangka kelompok Islam transnasional terhadap kelompok muslim moderat. Pemahaman tersebut diperlukan dalam rangka untuk mengetahui variabel yang dapat digunakan untuk mengendalikan prasangka kelompok muslim transnasional terhadap kelompok muslim moderat. Selain itu dapat memberikan informasi kepada para peneliti, anggota kelompok keagamaan, pemerintah, dan masyarakat dalam usaha untuk menciptakan relasi yang harmonis antarkelompok keagamaan.